

SALINAN  
NOMOR 7/2019

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di

- Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1

- Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1966);
28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 65);
29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 16);
32. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);

33. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
34. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Jatim (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
36. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 20);
37. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
38. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

39. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan lembaran daerah Kota Malang Nomor 34);
40. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 6);
41. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG  
dan  
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.



## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula sebesar Rp. 2.206.279.960.578,09 (dua trilyun dua ratus enam milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah sembilan sen) bertambah sebesar Rp. 446.017.238.328,62 (empat ratus empat puluh enam milyar tujuh belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah enam puluh dua sen) sehingga menjadi Rp. 2.652.297.198.906,71 (dua trilyun enam ratus lima puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus enam rupiah tujuh puluh satu sen) dengan rincian, sebagai berikut:

1. Pendapatan:			
a. Semula	Rp.	2.101.362.952.383,09	
b. Bertambah	Rp.	<u>85.721.981.831,60</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 2.187.084.934.214,69
2. Belanja:			
a. Semula	Rp.	2.206.279.960.578,09	
b. Bertambah	Rp.	446.017.238.328,62	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp. 2.652.297.198.906,71
Defisit setelah Perubahan			<u>Rp. (465.212.264.692,02)</u>
3. Pembiayaan:			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	129.392.008.195,00	
2) Bertambah	Rp.	360.627.256.497,02	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 490.019.264.692,02

x

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	24.475.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	332.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 24.807.000.000,00
Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan			<u>Rp. 465.212.264.692,02</u>

Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	533.511.294.685,00	
2) Bertambah	Rp.	79.540.733.869,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan			Rp. 613.052.028.554,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	1.215.649.394.188,00	
2) Bertambah	Rp.	32.701.107.962,60	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan			Rp. 1.248.350.502.150,60

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp.	352.202.263.510,09	
2) Berkurang	Rp.	(26.519.860.000,00)	
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan			Rp. 325.682.403.510,09

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	430.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	71.144.000.000,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan			Rp. 501.144.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	42.963.819.700,00	
2) Bertambah	Rp.	2.223.713.500,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp. 45.187.533.200,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	25.014.262.985,00	
2) Berkurang	Rp.	(2.428.347.507,00)	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 22.585.915.478,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp.	35.533.212.000,00	
2) Bertambah	Rp.	8.601.367.876,00	
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan			Rp. 44.134.579.876,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp.	113.684.568.188,00	
2) Bertambah	Rp.	33.907.556.000,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp. 147.592.124.188,00

b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp.	886.503.661.000,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp. 886.503.661.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp.	215.461.165.000,00	
2) Berkurang	Rp.	(1.206.448.037,40)	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan			Rp. 214.254.716.962,60
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Pendapatan Hibah			
1) Semula	Rp.	66.393.280.000,00	
2) Berkurang	Rp.	(965.080.000,00)	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp. 65.428.200.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1) Semula	Rp.	208.600.575.510,09	
2) Berkurang	Rp.	(25.675.809.000,00)	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp. 182.924.766.510,09
c. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus			
1) Semula	Rp.	73.871.078.000,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp. 73.871.078.000,00

d. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya			
1) Semula	Rp.	3.337.330.000,00	
2) Bertambah	Rp.	121.029.000,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp. 3.458.359.000,00

## Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Belanja tidak langsung

1) Semula	Rp.	946.110.537.278,09	
2) Bertambah	Rp.	372.093.704.838,20	
Jumlah Belanja tidak langsung setelah Perubahan			Rp. 1.318.204.242.116,29

b. Belanja langsung

1) Semula	Rp.	1.260.169.423.300,00	
2) Bertambah	Rp.	73.923.533.490,42	
Jumlah Belanja langsung setelah Perubahan			Rp. 1.334.092.956.790,42

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.	842.944.367.125,09	
2) Bertambah	Rp.	3.466.074.975,00	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan			Rp. 846.410.442.100,09

b. Belanja bunga				
1) Semula	Rp.		0,00	
2) Bertambah	Rp.		0,00	
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan			Rp.	0,00
c. Belanja hibah				
1) Semula	Rp.	81.883.217.200,00		
2) Berkurang	Rp.	(1.238.000.000,00)		
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan			Rp.	80.645.217.200,00
d. Belanja bantuan sosial				
1) Semula	Rp.	500.000.000,00		
2) Bertambah	Rp.	1.015.000.000,00		
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan			Rp.	1.515.000.000,00
e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa				
1) Semula	Rp.		0,00	
2) Bertambah	Rp.		0,00	
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan			Rp.	0,00
f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa/Partai Politik				
1) Semula	Rp.	663.728.700,00		
2) Bertambah	Rp.	35.000.000,00		
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan			Rp.	698.728.700,00

g. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp.	20.119.224.253,00	
2) Bertambah	Rp.	368.815.629.863,20	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan			Rp. 388.934.854.116,20
(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp.	225.089.525.675,00	
2) Berkurang	Rp.	(5.169.646.500,65)	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan			Rp. 219.919.879.174,35
b. Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp.	679.488.937.741,91	
2) Bertambah	Rp.	51.154.841.053,65	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan			Rp. 730.643.778.795,56
c. Belanja modal			
1) Semula	Rp.	355.590.959.883,09	
2) Bertambah	Rp.	27.938.338.937,42	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan			Rp. 383.529.298.820,51

## Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

## a. Penerimaan sejumlah

1) Semula	Rp.	129.392.008.195,00
2) Bertambah	Rp.	360.627.256.497,02

		Rp.	490.019.264.692,02
Jumlah penerimaan setelah Perubahan			
b. Pengeluaran sejumlah			
1) Semula	Rp.	24.475.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	332.000.000,00	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan			
		Rp.	24.807.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah			
1) Semula	Rp.	129.392.008.195,00	
2) Bertambah	Rp.	360.627.256.497,02	
Jumlah SiLPA tahun anggaran setelah Perubahan			
		Rp.	490.019.264.692,02
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah SiLPA tahun anggaran setelah Perubahan			
		Rp.	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan			
		Rp.	0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah			
1) Semula	Rp.	24.475.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan			
		Rp.	24.475.000.000,00



## c. Pembayaran pokok utang sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	332.000.000,00	
Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan			Rp. 332.000.000,00

## Pasal 5

- (1) Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang terjadi setelah Perubahan APBD ditetapkan, Walikota Malang dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. program dan kegiatan yang dananya bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN, dan/atau bantuan keuangan dari Provinsi yang diterima setelah Perubahan APBD ditetapkan;
  - c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

## Pasal 6

Program dan kegiatan yang bersifat mendesak dan/atau dalam keadaan darurat dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD.

## Pasal 7

Uraian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD.
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Rekapitulasi Piutang Daerah.
8. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 8

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 23 Agustus 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

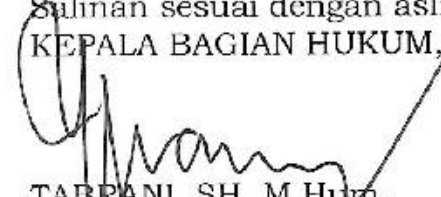
Diundangkan di Malang  
pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 234 - 7/2019

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

**PEMERINTAH KOTA MALANG  
RINGKASAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2019**

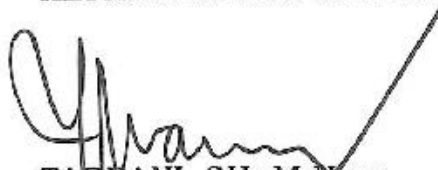
Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2,101,362,952,383.09</b>	<b>2,187,084,934,214.69</b>	<b>85,721,981,831.60</b>	<b>4.07</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>533,511,294,685.00</b>	<b>613,052,028,554.00</b>	<b>79,540,733,869.00</b>	<b>14.90</b>
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	430,000,000,000.00	501,144,000,000.00	71,144,000,000.00	16.54
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	42,963,819,700.00	45,187,533,200.00	2,223,713,500.00	5.17
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25,014,262,985.00	22,585,915,478.00	(2,428,347,507.00)	(9.70)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35,533,212,000.00	44,134,579,876.00	8,601,367,876.00	24.20
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1,215,649,394,188.00</b>	<b>1,248,350,502,150.60</b>	<b>32,701,107,962.60</b>	<b>2.69</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	113,684,568,188.00	147,592,124,188.00	33,907,556,000.00	29.82
1.2.2	Dana Alokasi Umum	886,503,661,000.00	886,503,661,000.00	0.00	0.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	215,461,165,000.00	214,254,716,962.60	(1,206,448,037.40)	(0.55)
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>352,202,263,510.09</b>	<b>325,682,403,510.09</b>	<b>(26,519,860,000.00)</b>	<b>(7.52)</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	66,393,280,000.00	65,428,200,000.00	(965,080,000.00)	(1.45)
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	208,600,575,510.09	182,924,766,510.09	(25,675,809,000.00)	(12.30)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	73,871,078,000.00	73,871,078,000.00	0.00	0.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	3,337,330,000.00	3,458,359,000.00	121,029,000.00	3.62
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2,101,362,952,383.09</b>	<b>2,187,084,934,214.69</b>	<b>85,721,981,831.60</b>	<b>4.08</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>2,206,279,960,578.09</b>	<b>2,652,297,198,906.71</b>	<b>446,017,238,328.62</b>	<b>20.21</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>946,110,537,278.09</b>	<b>1,318,204,242,116.29</b>	<b>372,093,704,838.20</b>	<b>39.32</b>
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	842,944,367,125.09	846,410,442,100.09	3,466,074,975.00	0.41
2.1.4	BELANJA HIBAH	81,883,217,200.00	80,645,217,200.00	(1,238,000,000.00)	(1.51)
2.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	500,000,000.00	1,515,000,000.00	1,015,000,000.00	203.00
2.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA/PARTAI POLITIK	663,728,700.00	698,728,700.00	35,000,000.00	5.27
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	20,119,224,253.00	388,934,854,116.20	368,815,629,863.20	1,833.15

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
<b>2.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1,260,169,423,300.00</b>	<b>1,334,092,956,790.42</b>	<b>73,923,533,490.42</b>	<b>5.86</b>
2.2.1	BELANJA PEGAWAI	225,089,525,675.00	219,919,879,174.35	(5,169,646,500.65)	(2.29)
2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	679,488,937,741.91	730,643,778,795.56	51,154,841,053.65	7.52
2.2.3	BELANJA MODAL	355,590,959,883.09	383,529,298,820.51	27,938,338,937.42	7.85
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>2,206,279,960,578.09</b>	<b>2,652,297,198,906.71</b>	<b>446,017,238,328.62</b>	<b>20.22</b>
	<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(104,917,008,195.00)</b>	<b>(465,212,264,692.02)</b>	<b>(360,295,256,497.02)</b>	<b>0.00</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	129,392,008,195.00	490,019,264,692.02	360,627,256,497.02	278.70
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>129,392,008,195.00</b>	<b>490,019,264,692.02</b>	<b>360,627,256,497.02</b>	<b>278.71</b>
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	24,475,000,000.00	24,475,000,000.00	0.00	0.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0.00	332,000,000.00	332,000,000.00	100.00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>24,475,000,000.00</b>	<b>24,807,000,000.00</b>	<b>332,000,000.00</b>	<b>1.36</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>104,917,008,195.00</b>	<b>465,212,264,692.02</b>	<b>360,295,256,497.02</b>	<b>343.41</b>
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(0.00)</b>	

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIR 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
 NOMOR 7 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA MALANG  
 RINGKASAN PERUBAHAN APED MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI  
 TAHUN ANGGARAN 2019

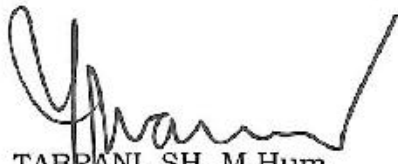
Kode	Organisasi - Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan				Belanja						Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Rp	%
				Rp	%	Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja	Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja		
1	2	3	4	5=4-3	6	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	13=12-9	14
1.01.01	Dinas Pendidikan	11,942,500.00	11,000,000.00	(942,500.00)	(7.89)	335,063,447,581.92	155,908,691,000.00	490,972,138,581.92	335,063,447,581.92	166,570,391,923.60	521,633,839,505.52	30,661,700,923.60	6.24
1.01.01	01 Pendidikan	11,942,500.00	11,000,000.00	(942,500.00)	(7.89)	335,063,447,581.92	155,908,691,000.00	490,972,138,581.92	335,063,447,581.92	166,570,391,923.60	521,633,839,505.52	30,661,700,923.60	6.24
1.01.02	SMP NEGERI 1 MALANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759,500,000.00	1,759,500,000.00	0.00	976,500,000.00	976,500,000.00	(783,000,000.00)	(44.50)
1.01.02	02 Pendidikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759,500,000.00	1,759,500,000.00	0.00	976,500,000.00	976,500,000.00	(783,000,000.00)	(44.50)
1.01.03	SMP NEGERI 2 MALANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,548,740,000.00	2,548,740,000.00	0.00	1,409,940,000.00	1,409,940,000.00	(1,138,800,000.00)	(44.68)
1.01.03	03 Pendidikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,548,740,000.00	2,548,740,000.00	0.00	1,409,940,000.00	1,409,940,000.00	(1,138,800,000.00)	(44.68)
1.01.04	SMP NEGERI 3 MALANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,000,000.00	1,936,000,000.00	0.00	1,071,000,000.00	1,071,000,000.00	(865,000,000.00)	(44.67)
1.01.04	04 Pendidikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,000,000.00	1,936,000,000.00	0.00	1,071,000,000.00	1,071,000,000.00	(865,000,000.00)	(44.67)
1.01.05	SMP NEGERI 4 MALANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,054,700,000.00	2,054,700,000.00	0.00	1,140,300,000.00	1,140,300,000.00	(924,400,000.00)	(44.77)
1.01.05	05 Pendidikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,054,700,000.00	2,054,700,000.00	0.00	1,140,300,000.00	1,140,300,000.00	(924,400,000.00)	(44.77)
1.01.06	SMP NEGERI 5 MALANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,043,900,000.00	2,043,900,000.00	0.00	1,127,700,000.00	1,127,700,000.00	(916,200,000.00)	(44.82)
1.01.06	06 Pendidikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,043,900,000.00	2,043,900,000.00	0.00	1,127,700,000.00	1,127,700,000.00	(916,200,000.00)	(44.82)
1.01.07	SMP NEGERI 6 MALANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,480,000.00	1,780,480,000.00	0.00	992,880,000.00	992,880,000.00	(787,600,000.00)	(44.23)
1.01.07	07 Pendidikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,480,000.00	1,780,480,000.00	0.00	992,880,000.00	992,880,000.00	(787,600,000.00)	(44.23)
1.01.08	SMP NEGERI 7 MALANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898,200,000.00	1,898,200,000.00	0.00	1,045,800,000.00	1,045,800,000.00	(852,400,000.00)	(44.90)
1.01.08	08 Pendidikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898,200,000.00	1,898,200,000.00	0.00	1,045,800,000.00	1,045,800,000.00	(852,400,000.00)	(44.90)
1.01.09	SMP NEGERI 8 MALANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947,060,000.00	1,947,060,000.00	0.00	1,072,260,000.00	1,072,260,000.00	(874,800,000.00)	(44.92)
1.01.09	09 Pendidikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947,060,000.00	1,947,060,000.00	0.00	1,072,260,000.00	1,072,260,000.00	(874,800,000.00)	(44.92)
1.01.10	SMP NEGERI 9 MALANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812,040,000.00	1,812,040,000.00	0.00	1,013,040,000.00	1,013,040,000.00	(799,000,000.00)	(44.09)
1.01.10	10 Pendidikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812,040,000.00	1,812,040,000.00	0.00	1,013,040,000.00	1,013,040,000.00	(799,000,000.00)	(44.09)
1.01.11	SMP NEGERI 10 MALANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106,220,000.00	2,106,220,000.00	0.00	1,180,620,000.00	1,180,620,000.00	(925,600,000.00)	(43.94)
1.01.11	11 Pendidikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106,220,000.00	2,106,220,000.00	0.00	1,180,620,000.00	1,180,620,000.00	(925,600,000.00)	(43.94)
1.01.12	SMP NEGERI 11 MALANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,100,000.00	1,754,100,000.00	0.00	963,900,000.00	963,900,000.00	(790,200,000.00)	(45.04)
1.01.12	12 Pendidikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,100,000.00	1,754,100,000.00	0.00	963,900,000.00	963,900,000.00	(790,200,000.00)	(45.04)
1.01.13	SMP NEGERI 12 MALANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679,440,000.00	1,679,440,000.00	0.00	924,840,000.00	924,840,000.00	(754,600,000.00)	(44.93)
1.01.13	13 Pendidikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679,440,000.00	1,679,440,000.00	0.00	924,840,000.00	924,840,000.00	(754,600,000.00)	(44.93)
1.01.14	SMP NEGERI 13 MALANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909,280,000.00	1,909,280,000.00	0.00	1,055,880,000.00	1,055,880,000.00	(853,400,000.00)	(44.69)
1.01.14	14 Pendidikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909,280,000.00	1,909,280,000.00	0.00	1,055,880,000.00	1,055,880,000.00	(853,400,000.00)	(44.69)
1.01.15	SMP NEGERI 14 MALANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,500,000.00	1,949,500,000.00	0.00	1,089,900,000.00	1,089,900,000.00	(859,600,000.00)	(44.09)
1.01.15	15 Pendidikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,500,000.00	1,949,500,000.00	0.00	1,089,900,000.00	1,089,900,000.00	(859,600,000.00)	(44.09)
1.01.16	SMP NEGERI 15 MALANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,800,000.00	1,972,800,000.00	0.00	1,106,800,000.00	1,106,800,000.00	(864,000,000.00)	(43.79)
1.01.16	16 Pendidikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,800,000.00	1,972,800,000.00	0.00	1,106,800,000.00	1,106,800,000.00	(864,000,000.00)	(43.79)
1.01.17	SMP NEGERI 16 MALANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,020,000.00	2,000,020,000.00	0.00	1,079,820,000.00	1,079,820,000.00	(920,200,000.00)	(46.00)
1.01.17	17 Pendidikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,020,000.00	2,000,020,000.00	0.00	1,079,820,000.00	1,079,820,000.00	(920,200,000.00)	(46.00)
1.01.18	SMP NEGERI 17 MALANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,580,000.00	1,966,580,000.00	0.00	1,112,580,000.00	1,112,580,000.00	(854,000,000.00)	(43.42)

Kode	Organisasi - Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan				Belanja						Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Rp	%
		Rp	Rp	Rp	%	Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja	Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja		
		3	4	5=4-3	6	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	13=12-9	14
4.06.0502	Kelurahan Ciptomulyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00	0.00	1,255,000,000.00	1,255,000,000.00	5,000,000.00	0.40
4.06.0502	0502 Pemerintahan Administrasi Kecamatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00	0.00	1,255,000,000.00	1,255,000,000.00	5,000,000.00	0.40
4.06.0503	Kelurahan Gadang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	0.00	1,305,000,000.00	1,305,000,000.00	5,000,000.00	0.38
4.06.0503	0503 Pemerintahan Administrasi Kecamatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	0.00	1,305,000,000.00	1,305,000,000.00	5,000,000.00	0.38
4.06.0504	Kelurahan Kebensari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	0.00	1,205,000,000.00	1,205,000,000.00	5,000,000.00	0.41
4.06.0504	0504 Pemerintahan Administrasi Kecamatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	0.00	1,205,000,000.00	1,205,000,000.00	5,000,000.00	0.41
4.06.0505	Kelurahan Bandungrejosari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000,000.00	1,450,000,000.00	0.00	1,455,000,000.00	1,455,000,000.00	5,000,000.00	0.34
4.06.0505	0505 Pemerintahan Administrasi Kecamatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000,000.00	1,450,000,000.00	0.00	1,455,000,000.00	1,455,000,000.00	5,000,000.00	0.34
4.06.0506	Kelurahan Tanjung Rejo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	0.00	1,305,000,000.00	1,305,000,000.00	5,000,000.00	0.38
4.06.0506	0506 Pemerintahan Administrasi Kecamatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	0.00	1,305,000,000.00	1,305,000,000.00	5,000,000.00	0.38
4.06.0507	Kelurahan Pisangcandi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00	0.00	1,355,000,000.00	1,355,000,000.00	5,000,000.00	0.37
4.06.0507	0507 Pemerintahan Administrasi Kecamatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00	0.00	1,355,000,000.00	1,355,000,000.00	5,000,000.00	0.37
4.06.0508	Kelurahan Karang Besuki	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	0.00	1,205,000,000.00	1,205,000,000.00	5,000,000.00	0.41
4.06.0508	0508 Pemerintahan Administrasi Kecamatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	0.00	1,205,000,000.00	1,205,000,000.00	5,000,000.00	0.41
4.06.0509	Kelurahan Bandulan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	0.00	1,305,000,000.00	1,305,000,000.00	5,000,000.00	0.38
4.06.0509	0509 Pemerintahan Administrasi Kecamatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	0.00	1,305,000,000.00	1,305,000,000.00	5,000,000.00	0.38
4.06.0510	Kelurahan Mulyorejo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	0.00	1,205,000,000.00	1,205,000,000.00	5,000,000.00	0.41
4.06.0510	0510 Pemerintahan Administrasi Kecamatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	0.00	1,205,000,000.00	1,205,000,000.00	5,000,000.00	0.41
4.06.0511	Kelurahan Bakalanrajan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00	0.00	1,155,000,000.00	1,155,000,000.00	5,000,000.00	0.43
4.06.0511	0511 Pemerintahan Administrasi Kecamatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00	0.00	1,155,000,000.00	1,155,000,000.00	5,000,000.00	0.43
JUMLAH KESELURUHAN		2,101,362,952,383.00	2,187,094,934,214.00	85,731,981,831.00	4.08	946,110,537,275.00	1,260,169,423,300.00	2,206,279,960,576.00	1,316,204,242,114.29	1,334,092,956,790.42	2,650,297,198,906.71	446,017,236,326.62	20.22
Surplus / (Defisit)		0.00											

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
 NOMOR 7 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA MALANG  
 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,  
 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2019

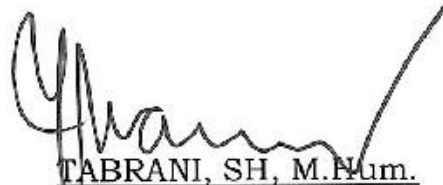
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan  
 ORGANISASI : 1.01.01 Dinas Pendidikan

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5.00	6	7
1.01	1.01.01	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH	11,942,500.00	11,000,000.00	(942,500.00)	(7.89)	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C)
1.01	1.01.01	00	00	4	1		Pendapatan Asli Daerah	11,942,500.00	11,000,000.00	(942,500.00)	(7.89)	
1.01	1.01.01	00	00	4	1	2	Hasil Retribusi Daerah	11,942,500.00	11,000,000.00	(942,500.00)	(7.89)	
1.01	1.01.01	00	00	4	2		Dana Perimbangan	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.01	1.01.01	00	00	4	3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00	
							PENDAPATAN DAERAH	11,942,500.00	11,000,000.00	(942,500.00)	(7.89)	
1.01	1.01.01			5			BELANJA					
1.01	1.01.01	00	00	5	1		BELANJA TIDAK LANGSUNG	335,063,447,581.92	335,063,447,581.92	0.00	0.00	
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	BELANJA PEGAWAI	335,063,447,581.92	335,063,447,581.92	0.00	0.00	
1.01	1.01.01						Belanja Langsung	155,908,691,000.00	186,570,391,923.60	30,661,700,923.60	19.66	
1.01	1.01.01						Pendidikan	155,908,691,000.00	186,570,391,923.60	30,661,700,923.60	19.66	



KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5.00	6	7
4.06	4.06.0511	17	116	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	0.00	341,000,000.00	341,000,000.00	0.00	
							Jumlah Belanja	1,150,000,000.00	1,155,000,000.00	5,000,000.00	0.43	
							Surplus / (Defisit)	(1,150,000,000.00)	(1,155,000,000.00)	(5,000,000.00)	(0.43)	
4.06	4.06.0511	00	00	6			PEMBIAYAAN DAERAH					
4.06	4.06.0511	00	00	6	1		Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.06	4.06.0511	00	00	6	2		Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	
							Pembiayaan Netto	0.00	0.00	0.00	0.00	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
 NOMOR 7 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH  
 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,  
 PROGRAM DAN KEGIATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2019

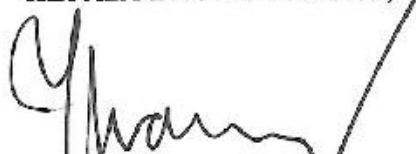
Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
			Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9	10	11=8+9+10	11	12
1	URUSAN WAJIB		131,719,373,525.00	403,871,087,816.91	314,660,699,758.09	850,251,161,100.00	128,109,673,824.35	438,992,001,947.50	339,376,843,468.51	906,448,519,240.42	56,197,358,140.42	43.87
1 01	Pendidikan		60,075,254,195.00	104,616,947,672.00	39,923,769,133.00	204,615,971,000.00	57,117,596,195.00	105,124,309,966.00	51,327,755,760.00	213,569,671,923.60	6,953,700,923.60	4.37
1 01 1.0101	Dinas Pendidikan		40,310,617,695.00	79,944,938,422.00	35,653,134,883.00	155,908,691,000.00	40,982,559,195.00	93,943,468,878.00	49,644,363,850.00	186,570,391,923.60	30,661,700,923.60	19.60
1 01 1.0101 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		76,876,050.00	5,442,154,800.00	157,760,835.00	5,676,791,685.00	73,856,050.00	5,160,618,200.00	433,400,835.00	3,667,875,085.00	[8,916,600.00]	(0.15)
1 01 1.0101 01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	DAU	5,330,000.00	120,815,250.00	131,691,350.00	257,836,600.00	5,330,000.00	75,247,250.00	152,331,350.00	232,908,600.00	(24,928,000.00)	(9.66)
1 01 1.0101 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DAU	0.00	411,000,000.00	0.00	411,000,000.00	0.00	389,500,000.00	0.00	393,800,000.00	(22,200,000.00)	(5.40)
1 01 1.0101 01 004	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	DAU	0.00	352,500,000.00	0.00	352,500,000.00	0.00	161,822,000.00	0.00	161,822,000.00	(190,678,000.00)	(54.09)
1 01 1.0101 01 005	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional	DAU	0.00	51,000,000.00	0.00	51,000,000.00	0.00	50,630,000.00	0.00	50,630,000.00	(10,370,000.00)	(17.00)
1 01 1.0101 01 007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	DAU	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	0.00
1 01 1.0101 01 008	Penyediaan alat tulis kantor	DAU	5,426,600.00	609,573,400.00	0.00	675,000,000.00	5,426,600.00	553,851,220.00	0.00	559,307,820.00	(115,692,180.00)	(17.13)
1 01 1.0101 01 009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DAU	4,380,000.00	157,940,000.00	0.00	162,300,000.00	4,380,000.00	113,512,500.00	0.00	117,872,500.00	(44,427,500.00)	(27.37)
1 01 1.0101 01 010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DAU	4,100,000.00	72,470,000.00	0.00	76,570,000.00	7,260,000.00	42,258,000.00	0.00	49,519,000.00	(27,051,000.00)	(35.32)
1 01 1.0101 01 011	Penyediaan peralatan rumah tangga	DAU	0.00	0.00	18,069,485.00	18,069,485.00	0.00	0.00	273,069,485.00	273,069,485.00	255,000,000.00	1,411.21
1 01 1.0101 01 012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DAU	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00
1 01 1.0101 01 014	Penyediaan makanan dan minuman	DAU	19,518,450.00	524,958,000.00	0.00	535,473,450.00	10,518,450.00	456,989,900.00	0.00	467,508,350.00	(67,965,100.00)	(12.69)
1 01 1.0101 01 015	Repat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	DAU	4,600,000.00	645,400,000.00	0.00	650,000,000.00	3,220,000.00	795,527,230.00	0.00	799,747,230.00	149,747,230.00	23.03
1 01 1.0101 01 016	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	DAU	0.00	157,500,000.00	8,000,000.00	165,500,000.00	0.00	167,500,000.00	8,000,000.00	165,500,000.00	0.00	0.00
1 01 1.0101 01 019	Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	DAU	21,260,000.00	734,020,000.00	0.00	805,280,000.00	16,460,000.00	604,029,200.00	0.00	620,489,200.00	(184,790,800.00)	(22.94)
1 01 1.0101 01 020	Penyediaan pelayanan tamu-tamu dinas	DAU	7,000,000.00	119,469,400.00	0.00	126,469,400.00	7,000,000.00	119,469,400.00	0.00	126,469,400.00	0.00	0.00
1 01 1.0101 01 023	Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu	DAU	13,551,000.00	436,500,500.00	0.00	450,051,500.00	13,551,000.00	711,955,500.00	0.00	725,501,500.00	275,450,000.00	81.26
1 01 1.0101 01 028	Penyediaan Jasa Pengemudi/Supir Dinas	DAU	730,000.00	951,011,250.00	0.00	951,741,250.00	730,000.00	660,000,000.00	0.00	660,730,000.00	(1,011,250.00)	(0.15)
1 04 1.0101 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		70,083,000.00	1,603,875,380.00	1,481,197,500.00	3,155,155,880.00	76,083,000.00	1,410,203,530.00	1,779,390,590.00	3,265,677,120.00	110,521,240.00	3.50
1 01 1.0101 02 009	Pengadaan peralatan gedung kantor	DAU	7,740,000.00	0.00	504,476,900.00	512,216,900.00	7,740,000.00	0.00	603,671,860.00	816,411,990.00	304,193,090.00	59.38
1 01 1.0101 02 014	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	DAU	0.00	14,424,480.00	0.00	14,424,480.00	0.00	14,424,480.00	0.00	14,424,480.00	0.00	0.00
1 01 1.0101 02 015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DAU	3,150,000.00	195,850,000.00	0.00	200,000,000.00	3,150,000.00	195,850,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00
1 01 1.0101 02 017	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	DAU	1,250,000.00	55,750,000.00	0.00	57,000,000.00	1,250,000.00	55,750,000.00	0.00	57,000,000.00	0.00	0.00
1 01 1.0101 02 019	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	DAU	1,250,000.00	48,750,000.00	0.00	50,000,000.00	1,250,000.00	48,750,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
1 01 1.0101 02 023	Rehabilitasi Bidang/Berat Gedung Kantor	DAU	39,550,000.00	158,500,000.00	914,827,000.00	1,111,877,000.00	44,550,000.00	83,500,000.00	908,827,000.00	1,036,877,000.00	(75,000,000.00)	(6.74)
1 01 1.0101 02 025	Pengadaan bhm dan pelumas	DAU	8,041,000.00	823,735,000.00	0.00	831,776,000.00	5,641,000.00	816,064,950.00	0.00	823,105,050.00	(118,671,350.00)	(12.50)
1 01 1.0101 02 036	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan telekomunikasi	DAU	0.00	37,625,000.00	0.00	37,625,000.00	0.00	37,625,000.00	0.00	37,625,000.00	0.00	0.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
			Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9	10	11=8+9+10	11	12
4 06 4.060511 15	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		36,720,000.00	235,280,000.00	25,000,000.00	297,000,000.00	36,720,000.00	235,280,000.00	25,000,000.00	297,000,000.00	0.00	0.00
4 06 4.060511 15 058	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bakalankrajan	Lain Lain Pendapatan Daerah	800,000.00	1,200,000.00	0.00	2,000,000.00	800,000.00	1,200,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
4 06 4.060511 15 116	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Keceharian Lingkungan Kelurahan Bakalankrajan	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	0.00	0.00
4 06 4.060511 15 178	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Bakalankrajan	Lain Lain Pendapatan Daerah	34,920,000.00	169,080,000.00	25,000,000.00	230,000,000.00	34,920,000.00	169,080,000.00	25,000,000.00	230,000,000.00	0.00	0.00
4 06 4.060511 16	Program Pemberdayaan Masyarakat		23,390,000.00	139,510,000.00	0.00	163,000,000.00	23,390,000.00	151,551,000.00	0.00	174,941,000.00	11,941,000.00	7.32
4 06 4.060511 16 058	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Masyarakat di Wilayah / Tingkat Kelurahan Bakalankrajan	DAU	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
4 06 4.060511 16 116	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Masyarakat di Wilayah Kelurahan Bakalankrajan	DAU	3,050,000.00	11,950,000.00	0.00	15,000,000.00	3,050,000.00	11,950,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
4 06 4.060511 16 174	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bakalankrajan	DAU	1,800,000.00	98,200,000.00	0.00	100,000,000.00	1,800,000.00	98,200,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00
4 06 4.060511 16 232	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Bakalankrajan	DAU	5,450,000.00	6,550,000.00	0.00	12,000,000.00	5,450,000.00	6,550,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00
4 06 4.060511 16 290	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Bakalankrajan	DAU	2,600,000.00	17,400,000.00	0.00	20,000,000.00	2,600,000.00	17,400,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
4 06 4.060511 16 348	Penyusunan Profil Kelurahan Bakalankrajan	DAU	10,490,000.00	2,010,000.00	0.00	12,500,000.00	10,490,000.00	2,010,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00
4 06 4.060511 16 495	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bakalankrajan	DAU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,941,000.00	0.00	11,941,000.00	11,941,000.00	0.00
4 06 4.060511 17	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		32,400,000.00	608,600,000.00	49,000,000.00	690,000,000.00	32,400,000.00	650,659,000.00	0.00	683,059,000.00	(6,941,000.00)	(1.00)
4 06 4.060511 17 058	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Bakalankrajan	DAU	32,400,000.00	608,600,000.00	49,000,000.00	690,000,000.00	32,400,000.00	609,659,000.00	0.00	642,059,000.00	(47,941,000.00)	(56.42)
4 06 4.060511 17 116	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bakalankrajan	DAU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,000,000.00	0.00	341,000,000.00	341,000,000.00	0.00
JUMLAH			226,089,526,675.00	679,468,937,741.91	366,810,950,883.00	1,269,169,423,300.00	219,919,876,174.35	730,643,278,796.56	383,529,296,820.51	1,334,092,956,730.42	73,923,533,490.42	33.61

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH. M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

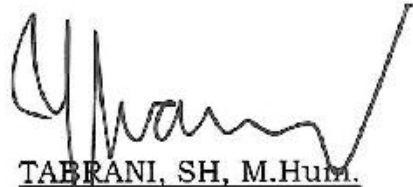
LAMPIRAN V  
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
 NOMOR 7 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA MALANG  
 REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
 DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA  
 TAHUN ANGGARAN 2019

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Belanja Tidak Langsung Sebelum Perubahan		Belanja Langsung Sebelum Perubahan			Jumlah 8=3+4+5+6+7
		Pegawai	Lainnya	Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7
01	Pelayanan Umum	224,679,769,424.79	103,166,170,153.00	89,897,210,150.00	244,373,482,925.00	30,696,864,125.00	692,813,496,777.79
01 1 07	Tenaga Kerja	3,655,040,917.26	0.00	403,770,000.00	3,413,910,000.00	126,500,000.00	7,599,220,917.26
01 1 16	Komunikasi dan Informatika	5,892,439,021.68	0.00	565,751,000.00	9,011,710,000.00	9,684,439,000.00	25,154,339,021.68
01 1 24	Kearsipan	0.00	0.00	11,130,000.00	373,750,000.00	0.00	384,880,000.00
01 3 01	Perencanaan	5,645,531,149.67	0.00	3,049,589,500.00	9,358,389,500.00	441,750,000.00	18,495,260,149.67
01 3 02	Keuangan	68,703,153,430.09	103,166,170,153.00	5,523,677,650.00	22,627,948,075.00	2,825,286,325.00	202,846,235,633.09
01 3 03	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	5,486,803,472.22	0.00	1,667,604,000.00	11,584,043,000.00	133,565,000.00	18,872,016,472.22
01 3 04	Penelitian dan Pengembangan	0.00	0.00	190,700,000.00	2,804,300,000.00	0.00	2,995,000,000.00
01 4 01	Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Pcrangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi	22,924,011,394.16	0.00	38,111,171,000.00	48,822,824,100.00	3,434,827,900.00	113,292,834,394.16
01 4 02	Pengawasan	5,129,934,402.42	0.00	3,763,129,000.00	3,916,961,450.00	401,550,700.00	13,211,575,552.42
01 4 03	Pendukung DPRD	31,631,475,466.93	0.00	1,931,936,000.00	65,264,563,000.00	7,132,501,000.00	105,960,475,466.93
01 4 06	Pemerintahan Administrasi Kecamatan	75,611,380,170.36	0.00	34,678,752,000.00	67,195,083,800.00	6,516,444,200.00	184,001,660,170.36
02	Pertahanan	0.00	0.00	27,600,000.00	137,400,000.00	0.00	165,000,000.00
02 1 21	Persandian	0.00	0.00	27,600,000.00	137,400,000.00	0.00	165,000,000.00
03	Ketertiban dan ketentraman	16,892,481,092.31	0.00	7,204,619,000.00	17,433,528,000.00	1,316,933,000.00	42,847,561,092.31
03 1 05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	13,295,489,344.77	0.00	6,085,162,000.00	11,652,998,000.00	946,120,000.00	31,979,769,344.77
03 4 04	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	3,596,991,747.54	0.00	1,119,457,000.00	5,780,530,000.00	370,813,000.00	10,867,791,747.54

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Belanja Tidak Langsung Sebelum Perubahan		Belanja Langsung Sebelum Perubahan			Jumlah
		Pegawai	Lainnya	Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7
11 1 12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6,976,981,533.31	0.00	610,357,000.00	7,061,603,000.00	468,210,000.00	15,117,151,533.31
11 4 05	Penanggulangan Bencana Daerah	3,203,296,148.48	0.00	469,602,000.00	6,746,743,000.00	1,565,060,000.00	11,984,701,148.48
<b>JUMLAH</b>		<b>842,944,367,125.09</b>	<b>103,166,170,153.00</b>	<b>225,089,525,675.00</b>	<b>679,488,937,741.91</b>	<b>355,690,959,883.09</b>	<b>2,206,279,960,578.09</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

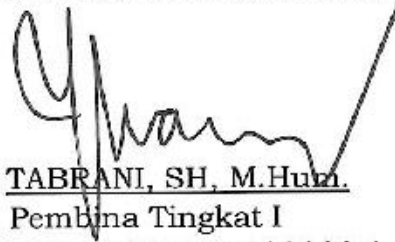
LAMPIRAN V  
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
 NOMOR 7 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA MALANG  
 REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2019

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Belanja Tdk Langsung Ssdh perubahan		Belanja Langsung Sesudah Perubahan			Jumlah Sesudah 14=9+10+11+12+13	Bertambah / (Berkurang )	
		Pegawai	Lainnya	Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Jumlah (Rp.)	%
1	2	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13	15 = 14-8	6
01	<b>Pelayanan Umum</b>	<b>228,648,019,874.79</b>	<b>471,793,800,016.20</b>	<b>88,717,390,350.00</b>	<b>261,844,142,352.00</b>	<b>30,577,757,848.00</b>	<b>1,081,581,110,440.99</b>	<b>(388,767,613,563.20)</b>	<b>56.11</b>
01 1 07	Tenaga Kerja	3,655,040,917.26	0.00	458,090,000.00	3,682,590,000.00	126,500,000.00	7,922,220,917.26	(323,000,000.00)	4.25
01 1 16	Komunikasi dan Informatika	5,892,439,021.68	0.00	783,993,000.00	12,298,233,124.00	8,067,831,876.00	27,042,497,021.68	(1,888,158,000.00)	7.50
01 1 24	Kearsipan	0.00	0.00	12,050,000.00	420,830,000.00	0.00	432,880,000.00	(48,000,000.00)	12.47
01 3 01	Perencanaan	5,645,531,149.67	0.00	2,839,382,500.00	9,188,916,500.00	821,430,000.00	18,495,260,149.67	0.00	0.00
01 3 02	Keuangan	72,180,363,430.09	471,793,800,016.20	5,891,027,650.00	26,049,438,925.00	4,067,153,825.00	579,981,773,846.29	(377,135,538,213.20)	185.92
01 3 03	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	5,486,803,472.22	0.00	1,701,050,000.00	12,249,563,000.00	168,265,000.00	19,605,681,472.22	(733,666,000.00)	3.88
01 3 04	Penelitian dan Pengembangan	0.00	0.00	418,460,000.00	3,026,540,000.00	0.00	3,445,000,000.00	(450,000,000.00)	15.02
01 4 01	Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi	22,915,061,844.16	0.00	37,572,773,000.00	55,089,041,100.00	4,056,538,900.00	119,633,414,844.16	(6,340,580,450.00)	5.59
01 4 02	Pengawasan	5,629,934,402.42	0.00	3,748,897,000.00	4,351,164,450.00	526,650,700.00	14,256,646,552.42	(1,045,071,000.00)	7.91
01 4 03	Pendukung DPRD	31,631,475,466.93	0.00	1,788,076,000.00	66,361,794,000.00	6,179,130,000.00	105,960,475,466.93	0.00	0.00
01 4 06	Pemerintahan Administrasi Kecamatan	75,611,380,170.36	0.00	33,503,591,200.00	69,126,031,253.00	6,564,257,547.00	184,805,260,170.36	(803,600,000.00)	0.43
02	<b>Pertahanan</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,200,000.00</b>	<b>220,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,000,000.00</b>	<b>(84,000,000.00)</b>	<b>50.90</b>
02 1 21	Persandian	0.00	0.00	28,200,000.00	220,800,000.00	0.00	249,000,000.00	(84,000,000.00)	50.90
03	<b>Ketertiban dan ketentraman</b>	<b>16,892,481,092.31</b>	<b>0.00</b>	<b>7,481,537,000.00</b>	<b>18,331,974,000.00</b>	<b>1,907,631,500.00</b>	<b>44,613,623,592.31</b>	<b>(1,766,062,500.00)</b>	<b>4.12</b>
03 1 05	Kelentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	13,295,489,344.77	0.00	6,250,186,000.00	12,860,430,000.00	1,339,726,500.00	33,745,831,844.77	(1,766,062,500.00)	5.52
03 4 04	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	3,596,991,747.54	0.00	1,231,351,000.00	5,471,544,000.00	567,905,000.00	10,867,791,747.54	0.00	0.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Belanja Tdk Langsung Ssdh perubahan		Belanja Langung Sesudah Perubahan			Jumlah Sesudah	Bertambah / (Berkurang )	
		Pegawai	Lainnya	Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Jumlah (Rp.)	%
1	2	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13	15 = 14-8	6
11	1 12	6,976,981,533.31	0.00	614,757,000.00	7,352,907,000.00	672,506.000.00	15,617,151,533.31	(500,000,000.00)	3.30
11	4 05	3,203,296,148.48	0.00	379,478,000.00	7,169,848,500.00	1,482,078,500.00	12,234,701,148.48	(250,000,000.00)	2.08
JUMLAH		846,410,442,100.09	471,793,800,016.20	219,919,879,174.36	730,643,778,796.56	383,529,298,820.51	2,652,297,198,906.71	(446,017,238,328.62)	20.22

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.  
Pembinu Tingkat I  
NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
 NOMOR 7 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

**DAFTAR PERUBAHAN JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PERJABATAN**

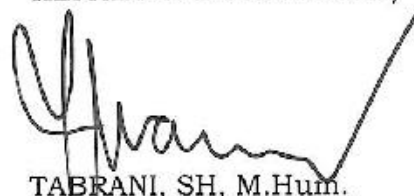
GOLONGAN	ESELON					STAF	JUMLAH
	I	II	III	IV	V		
IV/a	-	-	77	147	-	1,024	1,248
IV/b	-	7	44	1	-	354	406
IV/c	-	19	-	-	-	15	34
IV/d	-	4	-	-	-	-	4
<b>Jumlah Gol. IV</b>	-	<b>30</b>	<b>121</b>	<b>148</b>	-	<b>1,393</b>	<b>1,692</b>
III/a	-	-	-	-	-	958	958
III/b	-	-	-	14	-	815	829
III/c	-	-	-	142	-	462	604
III/d	-	-	7	367	-	366	740
<b>Jumlah Gol. III</b>	-	-	<b>7</b>	<b>523</b>	-	<b>2,601</b>	<b>3,131</b>
II/a	-	-	-	-	-	521	521
II/b	-	-	-	-	-	254	254
II/c	-	-	-	-	-	858	858
II/d	-	-	-	-	-	210	210
<b>Jumlah Gol. II</b>	-	-	-	-	-	<b>1,843</b>	<b>1,843</b>
I/a	-	-	-	-	-	10	10
I/b	-	-	-	-	-	13	13
I/c	-	-	-	-	-	460	460
I/d	-	-	-	-	-	34	34
<b>Jumlah Gol. I</b>	-	-	-	-	-	<b>517</b>	<b>517</b>
<b>TOTAL</b>	-	<b>30</b>	<b>128</b>	<b>671</b>	-	<b>6,354</b>	<b>7,183</b>

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

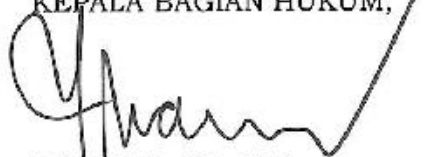


LAMPIRAN VII  
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
 NOMOR 7 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

**DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH**

NO	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL TGL. 1-1-2018	PENAMBAHAN 2018	PENGURANGAN 2018	SALDO AKHIR TGL. 31-12-2018
1	2	3	4	5	6
1	PIUTANG PAJAK	201,004,741,391.23	45,920,751,728.95	26,095,672,669.16	220,829,820,451.02
2	PIUTANG RETRIBUSI	9,245,811,442.62	4,679,009,815.91	3,024,824,338.65	10,899,996,919.88
3	PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	37,013,750,245.00		37,013,750,245.00	-
4	PIUTANG LAINNYA	28,764,037,110.27	1,744,068,591.39	26,346,480,584.90	4,161,625,116.76
		-	-	-	-
	JUMLAH	276,028,340,189.12	52,343,830,136.25	92,480,727,837.71	235,891,442,487.66

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

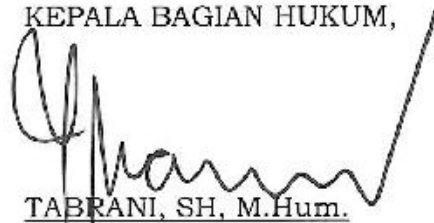
SUTIAJI

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
 NOMOR 7 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA MALANG  
 DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN  
 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2019

No	Kode	Judul Kegiatan	Jumlah anggaran TAHUN n-1		Jumlah Realisasi s.d akhir TA n-1	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp)TA n	
			APBD TA n-1	PERUBAHAN APBD TA n-1		APBD	PERUBAHAN APBD
1	2	3	4	5	6	7	8
			NIHIL				
Jumlah			-	-	-	-	-

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

